

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan sistematika untuk mendapat teori relevan sesuai pada permasalahan atau topik penelitian. Pada penelitian, tinjauan pustaka dipakai agar dapat membantu peneliti melakukan analisis di lapangan dengan merujuk teori-teori yang sudah ada dalam penelitian sebelumnya. Dengan mempelajari teori-teori yang relevan, peneliti akan memperoleh pemahaman yang berkaitan dengan subjek penelitiannya. Dalam penelitian ini, teori yang dijelaskan mengenai teori efektivitas, teori partisipasi politik, dan teori program.

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian diperlukan informasi-informasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, diperlukan penelitian terdahulu guna mengumpulkan informasi, melakukan analisis perbandingan, serta menemukan gagasan baru yang dapat menginspirasi penelitian berikutnya. Berikut beberapa jurnal dari penelitian terdahulu yang relevan, sebagai berikut :

Pertama, peneliti terdahulu dengan topik “Efektivitas Kinerja Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) dalam Membangun Tingkat Pendidikan Politik Masyarakat pada Pilkada 2020 Kota Makassar”, yang ditulis oleh Ridwan et al. (2023) memiliki tujuan untuk mengevaluasi dan mengkaji seberapa efektif program RPP untuk menambah partisipasi masyarakat melalui pembelajaran politik. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data dan analisis kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada hasil penelitian ini menyatakan bahwasannya meskipun program RPP telah dilaksanakan, masih terdapat sejumlah masyarakat yang belum memahami program tersebut secara menyeluruh. Hal tersebut di karenakan pada waktu itu terjadi pandemi covid-19, sehingga pendidikan politik dilakukan melalui media sosial termasuk RPP (Rumah Pintar Pemilu) yang menggunakan digitalisasi. Digitalisasi merupakan hal yang menarik dan banyak diminati oleh kalangan muda yang tentunya dalam hal ini dapat menaikkan edukasi politik. Akan tetapi, bagi sebagian masyarakat yang kurang menguasai perkembangan teknologi digital membuat implementasi digitalisasi untuk mendukung program RPP dengan harapan menaikkan angka edukasi politik secara merata di masa pandemi menjadi tidak terlaksanakan secara maksimal.

Selain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap digitalisasi RPP, penyebab belum efektifnya program ini karena masyarakat cenderung kurang begitu peduli atau belum terbuka dengan pendidikan politik. Masyarakat kebanyakan menganggap pemilihan umum hanyalah kegiatan memilih Presiden serta Wakil Presiden, Gubernur, Walikota, juga Bupati. Selain itu, pembangunan RPP untuk KPU Kota Makassar secara fisik belum ada atau belum terlaksana, sehingga masyarakat tidak dapat menikmati dan mengetahui secara langsung terkait pembelajaran dan praktik pemilihan umum. Kemudian fokusnya terletak pada diferensiasi antara penelitian saat ini dan sebelumnya. Penelitian terdahulu ini berfokus pada metode sosialisasi, sedangkan pada penelitian yang akan dikaji, peneliti akan membahas sejauh mana program RPP dapat menambah partisipasi masyarakat dengan studi kasus di KPU Kota Batu, karena adanya program tersebut bertujuan memberikan pendidikan pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Kedua, peneliti terdahulu dengan judul “Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Pariaman)”, yang ditulis oleh Sari & Rafni (2020) memiliki tujuan menjelaskan implementasi program RPP sebagai media edukasi pemilih oleh KPU Kota Pariaman. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa KPU Kota Pariaman menggunakan program RPP untuk mendidik pemilih, bukan hanya menggunakan ruang yang ada, tetapi juga melibatkan aktivitas sosial seperti *KPU Goes to school and campus*. Selanjutnya, fokus ini terletak pada perbedaan antara penelitian yang akan dan telah dilakukan. Dimana penelitian terdahulu ini menyatakan sosialisasi KPU Kota Pariaman fokus utamanya kepada lembaga pendidikan seperti sekolah atau kampus, sedangkan pada penelitian yang akan dikaji, peneliti ingin mengetahui seberapa efektif program RPP KPU Kota Batu dalam meningkatkan keterlibatan politik masyarakat.

Ketiga, peneliti terdahulu yang berjudul “Rumah Pintar Pemilu sebagai Strategi Komunikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula” yang ditulis oleh Simbolon (2019) memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan RPP KPU Kabupaten Toba Samosir sebagai metode untuk berkomunikasi dalam upaya menaikkan angka partisipasi masyarakat pemilih baru Kabupaten Toba Samosir. Penelitian ini dilakukan menggunakan metodologi

kualitatif deskriptif. Pada hasil penelitian mengungkapkan bahwa tujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih baru tidak tercapai oleh RPP KPU Kabupaten Toba Samosir.

Hal tersebut di karenakan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan waktu pengelolaan karena fokus pada kegiatan Pilkada tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019, kurangnya ketersediaan tenaga pendukung untuk mengawasi RPP, kurangnya dukungan dalam bentuk bantuan teknis dari KPU RI atau KPU Provinsi terkait RPP di KPU Kabupaten Toba Samosir, dan masih kurangnya media sosialisasi yang terdapat pada RPP di KPU Kabupaten Toba Samosir. Diferensiasi antara penelitian saat ini dan sebelumnya terletak pada fokusnya. Penelitian terdahulu ini lebih berfokus pada skema komunikasi yang masih kurang dan faktor yang mengakibatkan kurang optimalnya RPP di KPU Kabupaten Toba Samosir pada pelaksanaan edukasi politik terhadap pemilih pemula. Sementara itu pada penelitian KPU Kota Batu akan memeriksa hal-hal yang tidak hanya berkaitan dengan pemilih baru, tetapi juga pada seluruh segmen masyarakat, termasuk masyarakat umum dan segmen lainnya.

Keempat, peneliti terdahulu dengan judul “Strategi KPU Kota Sukabumi dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Pemilih Melalui Rumah Pintar Pemilu Tahun 2019” yang ditulis oleh Tasya et al. (2020) bertujuan untuk mengetahui skema KPU Kota Sukabumi pada implementasi edukasi politik kepada pemilih melalui RPP, terutama dalam menggunakan teknologi informasi dan berbagai inovasi yang diterapkan. Penelitian ini dilakukan dengan bantuan penerapan metodologi kualitatif deskriptif yang menggunakan analisis, tanya jawab, dan dokumentasi. Pada hasil penelitian menyatakan bahwa KPU Kota Sukabumi menerapkan beberapa strategi dalam melakukan edukasi politik RPP terhadap pemilih melalui penyampaian informasi lewat media sosial, mengadakan diskusi secara daring, serta menciptakan inovasi edukasi pemilih menggunakan inovasi MOCI (Mobil Cerdas Demokrasi). Salah satu yang membedakan analisis dari hasil penelitian sebelumnya adalah fokusnya. Penelitian terdahulu ini membahas pendidikan politik melalui teknologi informasi dan inovasi, sedangkan pada penelitian yang akan dikaji, penulis membahas peranan KPU Kota Batu dalam menyampaikan pendidikan politik dari berbagai metode baik secara offline maupun online.

Kelima, peneliti terdahulu dengan judul “Rumah Pintar Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang sebagai Pusat Pembelajaran Pemilih” yang ditulis oleh Wahyono et al. (2021) memiliki tujuan untuk mengevaluasi peran RPP KPU Kota Semarang sebagai tempat pemilih mendapatkan pendidikan pemilu. Penelitian ini dilakukan melalui penerapan metodologi kualitatif deskriptif, di mana data diperoleh melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa KPU Kota Semarang melakukan aktivitas pendidikan politik melalui ruang pameran, ruang audio visual, ruang simulasi, dan ruang diskusi yang ada di RPP. RPP KPU Kota Semarang dalam melakukan pendidikan politik juga menggunakan beberapa media seperti radio, web, selebaran, dan media sosial.

Selain itu, juga dilakukan kegiatan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk menyajikan pemahaman politik terhadap pemilih pemula, serta berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Berkenaan dengan kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik yaitu pada ketersediaan sumber daya manusia yang belum mencukupi dan adanya keterbatasan anggaran. Salah satu hal yang membedakan analisis dari hasil penelitian sebelumnya adalah fokusnya. Penelitian terdahulu ini menjelaskan tentang tahap-tahap KPU Kota Semarang dalam memberikan pendidikan politik, sedangkan pada penelitian yang akan dikaji penulis membicarakan bahan-bahan edukasi yang digunakan di RPP KPU Kota Batu.

Keenam, peneliti terdahulu dengan judul “Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu melalui Upaya Penguatan Kelembagaan Rumah Pintar Pemilu” yang ditulis oleh Harahap & Thamrin (2022) memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman mitra tentang peningkatan RPP. Metode penelitian menggunakan metode musyawarah dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan mitra telah mempunyai pemahaman baru terkait kekuatan RPP yang tercermin dalam tiga aspek, yaitu keahlian untuk mengidentifikasi masalah RPP, keahlian menemukan keuntungan RPP, dan keahlian merancang aktivitas dalam rangka memperkuat RPP. Salah satu hal yang membedakan analisis berdasarkan penelitian sebelumnya adalah fokusnya. Pada penelitian terdahulu menitikberatkan pada evaluasi pelaksanaan RPP melalui sosialisasi dengan menggandeng mitra masyarakat, sedangkan pada penelitian yang akan dikaji penulis membahas upaya KPU Kota Batu melakukan sosialisasi tidak hanya berfokus pada mitra tertentu, tetapi kepada hampir seluruh LSM dan lembaga

pendidikan yang ada di Kota Batu.

Ketujuh, peneliti terdahulu dengan judul “Sosialisasi Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula (Studi di KPU Kota Padang)” yang ditulis oleh Maharani & Al (2021) mempunyai tujuan untuk memahami upaya KPU Kota Padang pada penyebaran informasi tentang RPP sebagai alat untuk mengajarkan pemilih baru tentang politik. Metode kualitatif digunakan. Hasil penelitian terdahulu ini mengindikasikan bahwasannya KPU Kota Padang telah mengambil tindakan mensosialisasikan RPP melalui situs website resmi, layanan kunjungan langsung ke RPP KPU Padang, serta program kunjungan KPU *goes to school and campus*. Perbedaan antara analisis yang akan dilaksanakan dan sebelumnya terletak pada fokusnya. Pada penelitian terdahulu ini memusatkan perhatian pada upaya KPU Kota Padang untuk mempromosikan RPP. Sementara itu, pada penelitian yang akan dikaji penulis tidak hanya menyoroti upaya sosialisasi, tetapi juga mengukur efektivitas dari upaya tersebut dalam melakukan pendidikan pemilih melalui program RPP KPU Kota Batu.

Kedelapan, peneliti terdahulu dengan judul “Peran Rumah Pintar Pemilu KPU Bombana dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Bombana” yang ditulis oleh Waldi et al. (2019) memiliki tujuan menjelaskan peranan RPP KPU Bombana untuk pemilu Kabupaten Bombana 2019. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil pada penelitian terdahulu ini menyatakan bahwasannya peran Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Bombana pada Pemilu tahun 2019 melibatkan sosialisasi politik secara langsung ke masyarakat serta berkunjung ke sekolah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Bombana. Salah satu hal yang membedakan analisis dari hasil penelitian sebelumnya adalah fokusnya. Pada penelitian terdahulu ini berfokus pada cara menyampaikan pendidikan politik atau pemilih kepada masyarakat, sedangkan pada penelitian yang akan dikaji penulis tidak hanya berfokus pada upaya sosialisasi tetapi juga terkait ketersediaan sarana dan prasarana sebagai media sosialisasi dalam RPP KPU Kota Batu.

Kesembilan, peneliti terdahulu dengan topik “Peran Rumah Pintar Pemilu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Serentak” yang ditulis oleh A. P. Telaumbanua et al. (2021) memiliki tujuan mengevaluasi kegunaan KPU Kota Binjai dalam pelaksanaan RPP dan pelatihan pemilih masyarakat Kota Binjai pada

Pemilu 2019. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif pendekatan kualitatif untuk menyajikan data kualitatif tentang RPP yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Hasil penelitian pada penelitian terdahulu ini menyatakan bahwasannya pada pemilu tahun 2019, KPU Kota Binjai memegang peran sebagai fasilitator dan penyosialisasi dalam menyebarkan informasi dan agenda terkait pemilu. Pada pemilu tahun 2019, RPP Kota Binjai mampu menaikkan partisipasi pemilih. Partisipasi pada Pileg sebesar 7,92% dari awalnya 74,3% menjadi 82,26%. Sementara itu, partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilpres juga mengalami peningkatan sebesar 16,91% dari awalnya sebesar 65,68% menjadi 82,9%.

KPU Kota Binjai mengadakan kegiatan pendidikan pemilih dengan melakukan kunjungan ke institusi pendidikan lokal Kota Binjai. Selain itu, pihak RPP juga melaksanakan kursus kepemiluan pada tahun 2018 dan telah dilaksanakan sebanyak delapan kali. Hal tersebut sebagai bentuk bagian dari kegiatan pendidikan pemilih pemilu. Salah satu hal yang membedakan analisis dari hasil penelitian sebelumnya adalah fokusnya. Pada penelitian terdahulu ini berfokus pada peran KPU Kota Binjai sebagai fasilitator dan sosialitator dalam menginformasikan pendidikan pemilih dan agenda pemilihan umum, sedangkan pada penelitian yang akan dikaji penulis tidak hanya berfokus pada peranan KPU Kota Batu dalam mensosialisasikan agenda pemilu tetapi juga melakukan pengukuran apakah media yang digunakan sebagai media pendidikan atau media informasi sudah berperan secara optimal.

Kesepuluh, peneliti terdahulu dengan judul “Rumah Pintar Pemilu Kampar dan Peningkatan Literasi Politik Peserta Didik Tingkat SMA” yang ditulis oleh Fajrin et al. (2022) memiliki tujuan mendeskripsikan peran Rumah Pintar Pemilu Kampar dalam meningkatkan edukasi politik siswa tingkat SMA. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian terdahulu ini menerangkan bahwasannya Rumah Pintar Pemilu (RPP) Kampar memberikan pendidikan tentang nilai-nilai demokrasi, elektoral, dan nilai-nilai politik lainnya seperti memberikan pendidikan tentang negara dan kekuasaan, kegiatan lembaga politik otoritas dan perannya dalam melatih menyampaikan pendapat, peraturan pemerintah dan pelayanan publik, dan mengikutsertakan siswa dalam kegiatan politik. Perbedaan utama antara penelitian saat ini dan sebelumnya terletak pada fokusnya. Penelitian terdahulu ini berfokus pada Rumah Pintar Pemilu dengan memberi tahu pemilih, terutama pemilih baru dan pra

pemilih, sedangkan pada penelitian yang akan dikaji sasaran sosialisasi dan edukasi pemilih oleh KPU Kota Batu tidak hanya pada pemilih baru atau pra pemilih, tetapi pada seluruh tingkatan dalam masyarakat.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Efektivitas

a. Definisi Efektivitas

Efektivitas menurut Handoko dalam Purnama & Syaipuddin (2020) merupakan kapasitas untuk menentukan tujuan atau langkah-langkah yang sesuai untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Efektivitas merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan tingkat pencapaian keberhasilan aktivitas organisasi atau suatu program dalam memperoleh tujuan yang sudah ditetapkan. Efektivitas juga dapat didefinisikan sebagai cara optimal menghasilkan barang dengan menggunakan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam kuantitas tertentu yang sudah diatur secara sengaja atau layanan terhadap kegiatan yang dilaksanakan (Fithri et al., 2018). Berdasarkan definisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasannya efektivitas adalah cara untuk menilai seberapa baik pekerjaan, penerapan tugas, dan fungsi dalam menghasilkan *output* atau mencapai target sesuai dengan yang telah ditentukan.

Sutrisno dalam (Amrizal et al. 2018:43) mengemukakan terdapat lima aspek dalam efektivitas, sebagai berikut :

- a) Pemahaman program, merupakan realisasi program yang memungkinkan program berjalan dengan lancar, sehingga menjadi penting bagi para pelaksana dan penerima program agar program berjalan baik.
- b) Tepat sasaran, merupakan sasaran yang dituju harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c) Tepat waktu, menunjukkan kesesuaian penggunaan waktu yang telah ditentukan tanpa melebihi atau kurang dari waktu yang direncanakan.
- d) Tercapainya tujuan, menunjukkan bahwa semakin besar manfaat

yang diberikan oleh suatu program, maka semakin efektif program tersebut.

- e) Perubahan nyata, menunjukkan efektivitas program memiliki perubahan nyata secara langsung yang dirasakan oleh sasaran program.

Berdasar aspek tersebut, efektivitas digunakan sebagai standar untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan yang dipengaruhi oleh keseimbangan antara kualitas sumber daya manusia, lingkungan kerja, dan manajemen kerja sama secara koordinatif untuk mencapai suatu tujuan. Suatu organisasi atau program dapat dianggap efektif jika mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada konteks tersebut efektivitas mencerminkan pencapaian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian, efektivitas menjadi aspek penting untuk mengukur atau mengetahui sejauh mana suatu organisasi atau program yang telah ditetapkan.

Efektivitas suatu program juga dapat diartikan sebagai pengukuran kegiatan dalam program-program yang telah dijalankan dan seberapa jauh kemampuan dalam mencapai sasaran program-program tersebut. Sebuah organisasi dianggap efektif jika mampu memenuhi kepuasan pelanggan, mencapai visi organisasi, memenuhi aspirasi, menghasilkan keuntungan, mengembangkan sumber daya manusia, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di luar organisasi. Menurut Musaroh dalam Rompas et al. (2018) terdapat empat aspek yang menggambarkan efektivitas. *Pertama*, mengerjakan hal-hal yang benar, yaitu menyelesaikan tugas sesuai dengan rencana dan aturan yang telah ditetapkan. *Kedua*, mencapai tingkat yang lebih tinggi dari pesaing, yaitu mampu menjadi yang terbaik dibandingkan dengan lawan lainnya. *Ketiga*, menghasilkan *output* yang bermanfaat, yaitu pekerjaan yang dilakukan memberikan hasil yang berguna. *Keempat*, mengatasi tantangan masa depan.

Efektivitas melibatkan pengukuran terhadap sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas juga berkaitan dengan cara pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, manfaat dari hasil tersebut,

tingkat efisiensi dari unsur atau komponen, serta tingkat kepuasan pengguna atau klien. Efektivitas berhubungan antara *output* dengan tujuan, apabila semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan tersebut.

Efektivitas berfokus pada hasil (*outcome*), dimana suatu program atau kegiatan dianggap efektif jika *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, efektivitas menjadi penting dalam kemampuan memilih rencana atau strategi yang tepat untuk mencapai target yang ditetapkan, serta menjaga konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah upaya mencapai tujuan dengan memastikan pekerjaan diselesaikan tepat waktu. Penilaian terhadap pelaksanaan tugas sangat bergantung pada apakah tugas tersebut diselesaikan atau tidak, terutama dalam hal cara pelaksanaannya, pemanfaatan sumber daya yang digunakan, dan dampak yang dihasilkan.

b. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan efektivitas menjadi hal yang penting. Menurut Gibson, Donnely, dan Ivancevich dalam Vicky et al. (2019) mengemukakan bahwasanya pendekatan untuk mengukur efektivitas ialah pendekatan tujuan (*the goal approach*) dan pendekatan teori sistem (*the system theory approach*). Pendekatan tujuan berarti untuk mengukur efektivitas organisasi didasarkan pada pemahaman bahwa organisasi diciptakan untuk mencapai tujuan. Adapun pendekatan teori sistem dalam hal ini didasarkan pada pentingnya adaptasi organisasi terhadap tuntutan sistem sebagai kriteria efektivitas. Sistem dalam pandangan ini terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung dan berhubungan yang membentuk suatu kesatuan yang menekankan elemen inti *input-proses-output* untuk melindungi dan beradaptasi dengan lingkungan yang lebih besar yang mendukung organisasi.

Berdasarkan sudut pandang Martin dan Lubis dalam Arif (2018) terdapat beberapa pendekatan dalam efektivitas, yakni :

1. Pendekatan Sasaran (*Goals Approach*), mengukur efektivitas

dimulai dengan mengidentifikasi tujuan organisasi dan kemudian menilai efisiensi dalam mencapainya.

2. Pendekatan Sumber (*Resources Approach*), mengukur efisiensi berdasarkan keberhasilan organisasi dalam memperoleh berbagai sumber daya yang dibutuhkan.
3. Pendekatan Proses (*Process Approach*), untuk melihat sejauhmana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal organisasi.

Robbin membagi pendekatan menjadi empat bagian (Putra, 2020). Pertama, pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment approach*) berarti efektivitas suatu organisasi harus dinilai berdasarkan pencapaian tujuannya. Kedua, pendekatan sistem (*system approach*) menekankan bahwa untuk meningkatkan sistem organisasi perlu memperhatikan sumber daya manusia, mempertahankan stabilitas internal, serta memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi. Ketiga, pendekatan konstituen strategis (*strategic constituencis approach*) mengemukakan bahwa suatu organisasi dianggap efektif jika mampu memenuhi tuntutan dari konstituen yang mendukung kelangsungan eksistensi organisasi tersebut. Keempat, pendekatan nilai-nilai bersaing (*competing values approach*) terkait pada kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas organisasi.

Menurut Kreitner dan Kinicky dalam Erdina & Dyah (2018) menyatakan bahwa terdapat empat pendekatan efektivitas, yaitu :

1. Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)

Pada pendekatan ini pengukuran efektivitas memusatkan perhatian terhadap aspek *input*, yaitu dalam mengukur keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tingkatan *output* yang direncanakan. Pendekatan sasaran ini dimulai dengan mengidentifikasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

2. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber menilai proses awal kegiatan

organisasi dan memastikan apakah organisasi memperoleh sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

3. Pendekatan Proses (*Internal Process*)

Pendekatan ini memandang efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi internal dari yang menjalankan. Pendekatan ini tidak mempertimbangkan lingkungan eksternal organisasi, melainkan berfokus pada aktivitas yang dilakukan dengan sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana.

4. Pendekatan Gabungan (*Strategic Constituence satisfaction*)

Pendekatan ini merupakan gabungan dari tiga pendekatan sebelumnya. Pada pendekatan ini pengukuran efektivitas organisasi mencakup penilaian pada sisi *input*, efisiensi proses, dan keberhasilan dalam mencapai *output*.

Berdasarkan uraian pendapat di atas, diketahui bahwasannya masing-masing ahli memberikan lebih dari satu pendekatan untuk menilai efektivitas. Salah satu pendekatan yang selalu dijadikan unsur penting adalah tujuan. Dengan demikian, pada efektivitas menekankan pada penilaian yang berdasarkan pada pencapaian tujuannya.

c. Kriteria Efektivitas

Menurut Gibson dalam kriteria efektivitas dapat diukur dari kejelasan tujuan yang ingin dicapai, kejelasan strategi, proses analisis yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik (Wahyudi, 2019). Sutrisno dalam (Amrizal et al. 2018:43) mengemukakan terdapat lima kriteria efektivitas yang dapat digunakan yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Sharma dalam Nadiyahanti et al. (2023) menyajikan kriteria efektivitas yang melibatkan faktor internal dan eksternal, sebagai berikut:

- a) Produktivitas organisasi atau *output*.
- b) Efektivitas organisasi yang tercermin dari keberhasilannya

beradaptasi dengan perubahan-perubahan internal dan eksternal.

- c) Ketiadaan ketegangan pada organisasi atau hambatan-hambatan konflik antar bagian-bagian organisasi.

Menurut Jones dalam Nurwanda & Badriah (2020), efektivitas program dapat diukur dengan mempertimbangkan beberapa kriteria berikut:

1. Proses

Proses dalam hal ini terkait beberapa pertanyaan, yaitu :

- a) Apakah program yang ada mampu mencapai individu, keluarga, atau unit sasaran lainnya sesuai dengan yang diharapkan oleh program tersebut ?
- b) Apakah program tersebut menyediakan sumber daya, layanan dan manfaat atau keuntungan sebagaimana yang ada pada rancangan program ?

2. Penilaian dampak

Penilaian dampak dalam hal ini terkait beberapa pertanyaan, yaitu :

- a) Apakah program yang sedang berjalan efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan ?
- b) Apakah ada beberapa faktor lain di luar program yang dapat menjelaskan hasil yang diperoleh ?
- c) Apakah program yang dijalankan menghasilkan dampak yang tidak diharapkan ?

3. Efektivitas biaya

Efektivitas biaya dalam hal ini berhubungan dengan beberapa pertanyaan, yaitu :

- a) Berapa total biaya yang diperlukan untuk menyediakan layanan dan manfaat kepada pihak-pihak dalam program?
- b) Apakah program yang dijalankan lebih efisien daripada penggunaan alternatif sumber daya yang serupa ?

Efektivitas pelaksanaan suatu program menunjukkan kemampuan

suatu lembaga atau organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan tepat. Pada partisipasi politik masyarakat dalam program RPP sasarannya adalah seluruh segmen dalam masyarakat. Dengan demikian menjadi penting untuk suatu lembaga atau organisasi memperhatikan efektivitas suatu program, agar program yang dijalankan tidak dapat memberikan perubahan yang baik dan tidak membuang anggaran.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Faktor efektivitas berkaitan dengan kondisi yang mempengaruhi sejauh mana hasil yang diinginkan dapat dicapai. Richard M. Steers dalam Tian Sanjaya et al. (2022) menyatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas, sebagai berikut :

1. Adanya tujuan yang jelas

Tujuan memberikan motivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Tujuan dalam organisasi memberikan arahan dengan menggambarkan keadaan masa depan yang diinginkan dan selalu dikejar serta diwujudkan.

2. Struktur organisasi

Struktur dapat mempengaruhi efektivitas karena struktur merupakan kerangka dalam menjalankan lembaga atau organisasi. Struktur yang baik seharusnya kaya akan fungsi dan sederhana.

3. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat

Adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat menjadi penting. Pada hal ini masyarakat dapat memberikan masukan mengenai kebutuhan pada suatu program, sehingga program dapat lebih sesuai dan relevan dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, partisipasi masyarakat seringkali membawa tambahan sumber daya, baik dalam bentuk tenaga, waktu, maupun pengetahuan yang dapat mendukung pelaksanaan program secara lebih efektif dan efisien.

4. Adanya sistem nilai yang dianut

Sistem nilai yang dianut dalam hal ini merujuk pada cara atau nilai-nilai yang dipegang teguh oleh individu atau organisasi yang mempengaruhi dan membentuk kinerja dan hasil yang dicapai.

(Umam 2012:351) menyebutkan terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, diantaranya :

- a) Karakteristik organisasi
- b) Karakteristik lingkungan
- c) Karakteristik sumber daya
- d) Karakteristik manajemen

Berdasarkan faktor-faktor di atas dapat disimpulkan bahwasannya berjalannya suatu program sehingga mencapai tingkat efektif dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor utama terletak pada pelaksana suatu program. Selain itu, adanya sumber daya yang mendukung pelaksanaan suatu program salah satunya partisipasi masyarakat dapat dijadikan sebagai pendukung akan kebutuhan pada suatu program.

2.2.2 Program

a. Definisi Program

Program adalah serangkaian kegiatan yang konkret, terstruktur, dan terintegrasi yang dilakukan oleh satu atau beberapa lembaga pemerintah dengan kerja sama swasta dan masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program disusun berdasarkan tujuan atau target yang ingin dicapai. Program juga didefinisikan sebagai sekumpulan sumber daya dan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai satu atau lebih tujuan bersama. Sedangkan Farida Yusuf mengartikan program sebagai segala upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan menghasilkan dampak atau pengaruh (Zahara. et al., 2019).

Program merupakan seperangkat rencana kegiatan yang mengarah pada perubahan dengan menentukan dan mengidentifikasi audiens yang teridentifikasi. Pada pelaksanaan program terdapat tiga aktivitas utama yang harus diperhatikan yaitu interpretasi, organisasi, dan juga penerapan. Program juga sebagai sistem yang melibatkan serangkaian dari kegiatan

terencana, pengelolaan sumber daya, penetapan sasaran atau tujuan, kejelasan kebutuhan, partisipasi individu atau kelompok dalam konteks tertentu, kemampuan untuk menghasilkan hasil dan efek, dan adanya kepercayaan pada program, serta mempunyai fungsi atau manfaat.

Program tidak hanya memiliki karakteristik alokatif dan deskriptif, tetapi juga dapat bersifat inovatif dan multifungsi. Hal tersebut berarti program merupakan bentuk implementasi berupa aktivitas yang terstruktur, memiliki tujuan yang jelas, memiliki batasan waktu, serta terdapat ruang lingkup yang dilakukan dari serangkaian kegiatan yang ada dari organisasi. Secara umum program hadir untuk memberikan penyelesaian dari adanya suatu masalah yang terdapat di dalam masyarakat dan dapat mendorong motivasi serta inovasi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa program adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan dan terstruktur dengan maksud untuk mencapai hasil atau dampak tertentu. Biasanya program memerlukan penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, anggaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, perusahaan, dan yang lainnya. Tujuan dari sebuah program beragam, mulai dari peningkatan partisipasi masyarakat, kesejahteraan masyarakat, perbaikan kondisi lingkungan, hingga peningkatan efisiensi operasional suatu organisasi.

b. Karakteristik Program

Karakteristik yang ada pada suatu program dapat dirancang dan dilaksanakan dengan lebih efektif untuk mencapai hasil yang diharapkan. Bintoro dalam Munawaroh (2021) menjelaskan terdapat beberapa karakteristik pada program sebagai berikut :

- a) Penetapan tujuan yang jelas.
- b) Identifikasi penggunaan sumber daya.
- c) Pengembangan kerangka kebijakan yang konsisten.
- d) Pengukuran biaya dan perkiraan manfaat dari program.
- e) Keterkaitan program dengan kegiatan yang ada pada program

- f) Implementasi berbagai tindakan manajemen, termasuk tenaga kerja, pembiayaan, dan aspek lainnya untuk melaksanakan program tersebut.

Program merupakan elemen awal yang diperlukan untuk memulai suatu kegiatan. Dalam program diperlukan aspek-aspek untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jones juga menjelaskan aspek-aspek di dalam program, yaitu tujuan kegiatan yang akan dicapai, kegiatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan, menetapkan aturan dan prosedur, menyusun estimasi anggaran yang diperlukan, serta strategi pelaksanaan (Adriansyah et al., 2021).

c. Fungsi Program

Program yang dibuat tentunya bertujuan untuk memberikan dampak yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat. Program biasanya dirancang untuk mempermudah penyelesaian masalah dengan menyediakan sarana bagi sumber daya manusia untuk mengembangkan potensi yang dimiliki (Lumempow et al., 2021). Program juga dapat membantu mengatasi suatu masalah dengan menawarkan solusi yang efektif dan efisien. Selain itu, program juga berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan.

Evaluasi pada program dilakukan dengan tujuan mengetahui hasil program dan menemukan cara untuk memperbaikinya. Program dapat juga dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya, program bertujuan untuk memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat dengan mempermudah penyelesaian masalah, menyediakan sarana, dan menawarkan solusi yang efektif dan efisien. Secara keseluruhan program berperan penting dalam mengembangkan potensi dan mengatasi permasalahan yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.3 Partisipasi Politik

a. Definisi Partisipasi Politik

Negara demokratis memiliki keunggulan tersendiri, karena setiap pengambilan kebijakan didasarkan pada aspirasi masyarakat. Pada negara

demokrasi, masyarakat sebagai aktor utama yang memiliki peran penting. Salah satu peran masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi dalam politik. Termasuk di dalamnya menyampaikan pendapat dan hak untuk mengoreksi pemerintahan. Pergantian kepemimpinan sebagai suatu keharusan dalam sistem demokrasi yang membutuhkan keterlibatan masyarakat. Masyarakat memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan siapa yang akan duduk pada eksekutif dan legislatif baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah (Zarkasi & Rizal, 2020).

Menurut Michael Rush dan Philip Althoft yang dikutip oleh Arniti (2020) mengatakan bahwa partisipasi politik sebagai aktivitas masyarakat yang melibatkan diri untuk memberikan pengaruh pada penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta berperan dalam memutuskan pemimpin negara. Miriam Budiarjo menggambarkan partisipasi politik sebagai aktivitas oleh seseorang atau kelompok dan terlibat secara aktif politik secara langsung memilih pemimpin atau tidak langsung untuk dapat berdampak pada kebijakan pemerintah (Karmanis, 2021). Partisipasi politik mencakup serangkaian tindakan yang melibatkan masyarakat, baik secara langsung atau tidak langsung, berusaha mempengaruhi hukum yang ditetapkan pemerintah, dan berkaitan dengan kepentingan umum (Iqbal, 2020).

Ramlan Surbakti mendefinisikan partisipasi politik sebagai keterlibatan warga negara dalam menentukan keputusan yang berhubungan atau mempengaruhi hidup masyarakat (Rompas et al., 2018). Surbakti juga membagi dua jenis partisipasi politik, yaitu :

1. *Partisipasi aktif*, yaitu kegiatan yang berfokus pada masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Contoh dari partisipasi ini yaitu memberikan usul terkait kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan yang berbeda dari kebijakan yang diusulkan pemerintah, memberikan kritik dan saran untuk perbaikan kebijakan, memenuhi kewajiban pajak, dan berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin di pemerintahan.
2. *Partisipasi pasif*, yaitu kegiatan yang berorientasi pada hasil

atau keluaran (*output*). Contoh dari partisipasi ini yaitu menerima, mematuhi, dan menjalankan setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Secara luas, partisipasi politik merujuk pada berbagai cara dimana individu atau kelompok terlibat dalam proses politik untuk mempengaruhi kebijakan, institusi, atau arah negara. Keterlibatan tersebut mencakup beberapa aktivitas seperti pemilu, kampanye politik, demonstrasi, petisi, lobbying, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan negara. Partisipasi politik dalam cakupan luas merupakan ciri dari modernisasi politik. Konsep partisipasi politik telah digunakan dalam beragam konteks terkait perilaku, sikap, dan pandangan yang menjadi syarat penting dalam partisipasi politik. Huntington dan Nelson dalam Jafar et al. (2024) menyatakan bahwasannya partisipasi dapat terjadi baik secara individu maupun kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, dapat dilakukan dengan cara damai atau melalui kekerasan, legal atau illegal, serta bisa efektif atau tidak efektif.

Terkait dengan tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi di antaranya faktor tingkat pendidikan, kesadaran politik, kepercayaan terhadap institusi politik, kondisi ekonomi, dan budaya politik. Peningkatan partisipasi politik seringkali menjadi tujuan untuk memperkuat demokrasi, mendorong representasi yang lebih luas, dan memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

b. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Samuel Huntington dan Joan Nelson dalam (Gatara 2008:314) mengklasifikasikan partisipasi dalam politik ke dalam lima bentuk, sebagai berikut :

- a) *Electoral activity*, mencakup aktivitas yang berkaitan dengan pemilihan umum baik secara langsung ataupun tidak langsung.
- b) *Lobbying*, merujuk pada percobaan seseorang atau kelompok yang berbicara dengan pejabat atau politisi dengan tujuan

mempengaruhi kebijakan yang mempengaruhi kehidupan individu atau kelompok tersebut.

- c) *Organizational activity*, mencakup partisipasi masyarakat dalam organisasi politik dan sosial.
- d) *Contacting*, merujuk pada partisipasi warga negara dengan menjadi bagian dari pemerintah atau menghubungi politisi, baik secara pribadi maupun dalam kelompok.
- e) *Violence*, merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan dengan tujuan mempengaruhi pemerintah.

Bentuk-bentuk partisipasi politik sering digunakan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis dan memahami cara individu atau kelompok terlibat dalam kehidupan politik dan mempengaruhi pembuatan keputusan politik dalam masyarakat. Sastroatmodjo dalam Sunaryo (2019) mengemukakan bentuk partisipasi politik berdasarkan jumlah pelakunya dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu partisipasi individual dan partisipasi kolektif. Partisipasi individual dapat diwujudkan melalui kegiatan seperti menulis surat atau menyampaikan aspirasinya yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Adapun partisipasi kolektif melibatkan kegiatan warga negara secara bersamaan yang bertujuan untuk mempengaruhi pihak berwenang, seperti dalam kegiatan pemilu.

Milbrath dan Goel dalam Azzuhri et al. (2022) membedakan partisipasi politik ke dalam beberapa kategori :

1. Apatitis (*apathetics*), yaitu individu yang tidak berpartisipasi dan menjauh dari proses politik.
2. Penonton (*spectators*), yaitu individu yang setidaknya pernah berpartisipasi dalam pemilihan umum.
3. Pemain (*gladiators*), yaitu individu yang secara aktif terlibat dalam proses politik, seperti komunikator, aktivis partai, dan aktivis masyarakat.

Kegiatan politik yang termasuk dalam konsep partisipasi politik memiliki berbagai bentuk. Almond dalam (Suryadi 2007:133) menyatakan bahwa bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dan pada

waktu yang berbeda dapat diklasifikasikan menjadi kegiatan politik konvensional dan non-konvensional, sebagaimana gambar di bawah :

Gambar 2. 1 Bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non Konvensional
Pemberian suara (voting)	Pengajuan petisi
Diskusi politik	Berdemonstrasi
Kegiatan kampanye	Konfrontasi, mogok
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Tindak kekerasan politik harta benda (pengrusakan, pengeboman)
Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif	Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)

Sumber : Almond dalam (Suryadi, 2007:133)

Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang dianggap normal dalam demokrasi modern seperti pemberian suara, diskusi politik, kampanye, dan ikut serta dalam kelompok kepentingan. Adapun bentuk partisipasi non-konvensional mencakup berbagai aktivitas yang mungkin legal seperti petisi, maupun yang illegal, penuh kekerasan, dan bersifat revolusioner. Bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integrasi kehidupan politik, serta tingkat kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.

c. Hierarki Partisipasi Politik

Hierarki partisipasi politik dibagi berdasar tingkat keterlibatan individu dalam aktivitas politik yang menunjukkan variasi intensitas dari rendah hingga tinggi. Menurut Roth dan Wilson dalam (Shahreza & El-Yana 2016:124) hierarki partisipasi politik di gambarkan dalam bentuk piramida sebagaimana berikut :

Gambar 2. 2 Piramida Partisipasi Politik



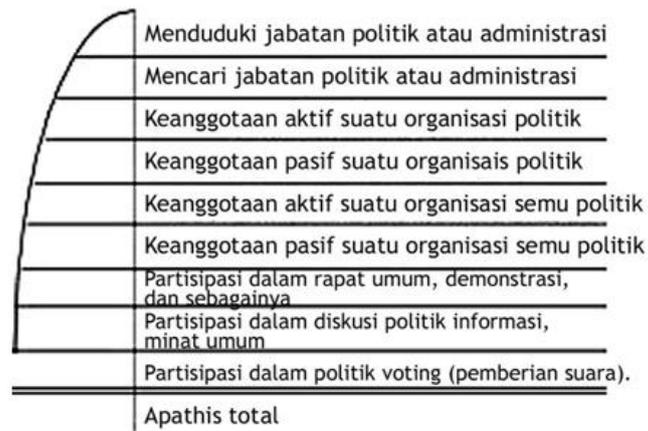
Sumber : Roth dan Wilson dalam (Shahreza & El-Yana, 2016:124)

Pada gambar piramida di atas, kelompok terbawah adalah partisipasi politik yang terdiri dari individu yang sama sekali tidak terlibat atau melakukan aktivitas politik yang disebut sebagai orang apolitis. Kelompok yang berada di atas orang-apolitis adalah kelompok pengamat yang biasanya terlibat dalam kegiatan politik seperti menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai/kelompok kepentingan, membicarakan masalah politik, mengikuti perkembangan politik melalui media massa, dan memberikan suara dalam pemilu. Selanjutnya kelompok yang berada di atas kelompok pengamat adalah kelompok partisipan, kegiatan politik yang sering dilakukan meliputi menjadi petugas kampanye, menjadi anggota aktif dari partai/kelompok kepentingan, dan aktif dalam proyek-proyek sosial. Adapun kelompok terakhir yang berada di bagian atas piramida partisipan adalah kelompok aktivis. Masyarakat yang termasuk pada kelompok ini jumlahnya sedikit dan terdiri dari pejabat umum, pejabat partai politik penuh waktu, dan pimpinan kelompok kepentingan.

Pada partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoff dalam Sastrawati (2019) terdapat hierarki partisipasi politik di antaranya, menduduki jabatan politik atau administratif, mencari jabatan politik atau administratif, keanggotaan aktif suatu organisasi politik, keanggotaan pasif suatu organisasi politik, keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (*quasi political*), keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (*quasi political*), partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, partisipasi dalam diskusi politik, dan voting atau pemberian suara. Hierarki tersebut

sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2. 3 Hierarki Partisipasi Politik



Sumber : Michael Rush dan Philip Althoff dalam (Sastrawati, 2019)

Hierarki partisipasi politik yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff menunjukkan bahwa di puncak hierarki terdapat individu-individu yang menduduki jabatan dalam sistem politik termasuk anggota birokrat pada berbagai tingkatan. Kelompok yang berada pada puncak hierarki ini memiliki kepentingan besar terhadap pelaksanaan kekuasaan politik formal, namun dalam pelaksanaan kekuasaan politik mereka tidak terlepas dari pengaruh individu-individu atau kelompok lain dalam sistem politik, termasuk mereka yang mencari jabatan politik.

Pada tingkatan di bawah individu atau kelompok yang mencari jabatan politik terdapat keanggotaan pada organisasi politik kelompok kepentingan. Perbedaan utama antara parpol dan kelompok kepentingan terletak pada persepsi mereka terhadap politik. Kelompok kepentingan adalah organisasi yang berupaya memajukan, mempertahankan, atau mewakili sikap-sikap yang terbatas. Setelah tujuan mereka tercapai, baik dalam waktu singkat maupun berkesinambungan, kelompok ini tidak memaksakan diri untuk terus terlibat dalam sistem. Sebaliknya, parpol berusaha memajukan, mempertahankan, dan mewakili aspek lebih luas. Oleh karena itu, basis pendukung parpol lebih luas dibandingkan dengan kelompok kepentingan.

Selanjutnya keanggotaan pasif suatu organisasi berarti ketidakterlibatan individu dalam parpol memiliki alasan tersendiri, tetapi

hal ini tidak berarti mereka sama sekali tidak berpartisipasi dalam politik. Pada diskusi seminar yang membahas politik, sering ditemukan individu-individu yang bukan anggota partai tetapi aktif mengikuti perkembangan politik, terlepas apakah kehadiran mereka difasilitasi oleh parpol atau kelompok kepentingan tertentu.

Bentuk partisipasi politik yang tidak terlalu intens atau sesekali adalah diskusi-diskusi informal. Bentuk partisipasi ini cenderung melibatkan beberapa orang, baik dalam keluarga, teman kerja, teman sekolah, maupun teman sebaya. Intensitas diskusi informal ini bergantung pada kondisi politik yang berkembang yang mana semakin menarik kondisi politik yang berkembang, maka semakin intens diskusi informal tersebut berlangsung. Kemudian tingkat hierarki terendah dalam partisipasi politik adalah voting atau pemberian suara, karena bentuk partisipasi ini memerlukan keterlibatan minimal dari masyarakat. Setelah proses pemberian suara selesai, partisipasi politik pun juga berhenti. Adapun bentuk partisipasi politik seperti kekerasan dan keterasingan oleh Rush tidak dimasukkan dalam tingkatan hierarki. Hal tersebut mencerminkan kehati-hatian, termasuk tidak memasukkan apatis atau kepasifan pada bentuk aktivitas politik.

d. Kelompok Partisipasi Politik

Pada konteks partisipasi politik, kelompok dapat didefinisikan sebagai unit sosial yang terdiri dari beberapa individu yang berbagi tujuan, nilai, dan kepentingan yang sama. Kelompok ini bisa berupa organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok kepentingan lainnya yang berperan dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Menurut Gabriel Almond dan Bingham Powell dalam (Budiardjo 2008:387-388) membagi kelompok kepentingan menjadi empat aspek sebagai berikut :

1. Kelompok Anomi

Kelompok ini tidak memiliki organisasi formal, tetapi orang-orang yang terlibat di dalamnya berbagi rasa ketidakpuasan yang sama. Ketidakpuasan ini kemudian memicu gerakan massal bersama dengan orang-orang yang tidak puas terhadap suatu keputusan atau kebijakan

yang diambil oleh pemerintah. Contoh dari tindakan atau aktivitas ini termasuk demonstrasi dan pemogokan yang terkadang dapat berujung pada tindakan kekerasan.

2. Kelompok Nonasosional

Kelompok ini muncul karena adanya rasa solidaritas yang tinggi antar saudara, kelompok etnis, kerabat, dan rekan kerja. Kelompok-kelompok ini biasanya tidak aktif dalam aktivitas atau kegiatan politik, namun anggotanya memiliki hubungan batin yang mendalam. Contoh kelompok semacam ini adalah perkumpulan pedagang kaki lima, kelompok penggemar kopi, dan lain-lain.

3. Kelompok Institusional

Kelompok-kelompok ini bersifat formal, keberadaannya lebih resmi, dan memiliki struktur organisasi yang lebih jelas. Contoh dari kelompok-kelompok ini adalah PGRI, PPNI, Dharma Wanita, KOPRI, dan lainnya.

4. Kelompok Asosiasi

Kelompok ini memiliki organisasi yang baik dan dibentuk dengan tujuan yang lebih jelas dan terarah. Hal ini menjadikan kelompok ini lebih efektif daripada kelompok-kelompok lain dalam memperjuangkan tujuan mereka. Contohnya adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan Federasi Persatuan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, serta lainnya.

5. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM adalah kelompok masyarakat yang muncul sebagai cermin dari kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap kemiskinan dan ketidakadilan sosial. LSM memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama bagi golongan masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, LSM juga berperan dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik yang diambil

oleh pemerintah.

e. Faktor-faktor Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat berbeda dalam intensitas dan bentuknya. Perbedaan ini tidak hanya berkaitan dengan sistem politik, tetapi juga berhubungan dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Menurut Weimer dalam (Aspiran, 2017) ada lima faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik yang lebih luas, sebagai berikut :

1. Faktor modernisasi. Adanya modernisasi dalam sebuah bidang akan berdampak pada komersialisasi pertanian, pertumbuhan industri, peningkatan literasi, peningkatan kualitas pendidikan, dan perkembangan media massa atau media komunikasi secara menyeluruh. Kemajuan tersebut mengakibatkan partisipasi aktif warga dalam mempengaruhi kebijakan dan menuntut partisipasi dalam kekuasaan politik sebagai bentuk kesadaran.
2. Faktor terjadinya perubahan struktur kelas sosial. Perubahan dalam struktur kelas sosial terjadi karena munculnya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas di era industri dan modernisasi. Pengaruh kaum intelektual dan peningkatan komunikasi masaa merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, dan egaliterisme telah menggerakkan tuntutan-tuntutan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.
3. Faktor adanya konflik antara elit politik. Pemimpin politik yang bersaing untuk memperebutkan kekuasaan seringkali mencari dukungan dari massa. Dampaknya adalah muncul tuntutan untuk hak-hak rakyat, yang mengakibatkan konflik dan perjuangan kelas menengah terhadap kaum bangsawan yang memegang kekuasaan.
4. Faktor keterlibatan pemerintah dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Perluasan cakupan aktivitas pemerintah seringkali mendorong pertumbuhan tuntutan-tuntutan terorganisir untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan

politik.

Menurut Milbrath dalam (Rush & Althoff 2005:165) menyebutkan terdapat empat faktor utama yang mendorong orang mau berpartisipasi dalam politik, yaitu sejauh mana orang menerima rangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial seseorang, dan keadaan politik. (Sanit 2011:110) menyebutkan terdapat lima faktor yang bisa mempengaruhi partisipasi politik, yaitu :

- a) Tersedianya kebebasan berkompetisi
- b) Tersedianya kenyataan berpolitik
- c) Tersedianya keleluasaan untuk mengorganisasi diri
- d) Tersedianya penyebaran sumber daya politik
- e) Tersedianya distribusi kekuasaan

Ramlan Surbakti dalam Seli (2019) menyatakan terdapat dua variabel penting yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang, yaitu kesadaran politik dan kepercayaan politik terhadap pemerintah. Aspek kesadaran politik seseorang mencakup kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, baik hak-hak politik, ekonomi, maupun hak untuk mendapatkan jaminan sosial dan hukum. Adapun aspek kepercayaan masyarakat lebih berkaitan dengan penilaian dan apresiasi masyarakat terhadap pemerintah, baik terkait kebijakan-kebijakan maupun pelaksanaan pemerintahan.

Dilihat dari faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik yakni kesadaran politik dan kepercayaan politik terhadap pemerintah, Jeffry Paige mengkategorikan partisipasi politik menjadi empat kategori, sebagaimana berikut :

Gambar 2. 4 Kategori Partisipasi Politik

KESADARAN POLITIK	KEPERCAYAAN POLITIK	
	Rendah	Tinggi
Rendah	Pasif-apatitis	Sangat pasif
Tinggi	Militan-radikal	Aktif

Sumber : Jeffry Paige dalam (Seli, 2019)

Partisipasi politik dapat dikategorikan menjadi empat jenis berdasarkan gambar tersebut, yaitu :

1. *Aktif*, jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi.
2. *Pasif-apatitis*, jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah.
3. *Militan-radikal*, jika kesadaran politik tinggi, tapi kepercayaan kepada pemerintah rendah.
4. *Sangat pasif*, jika kesadaran politik rendah, tapi kepercayaan kepada pemerintah tinggi.